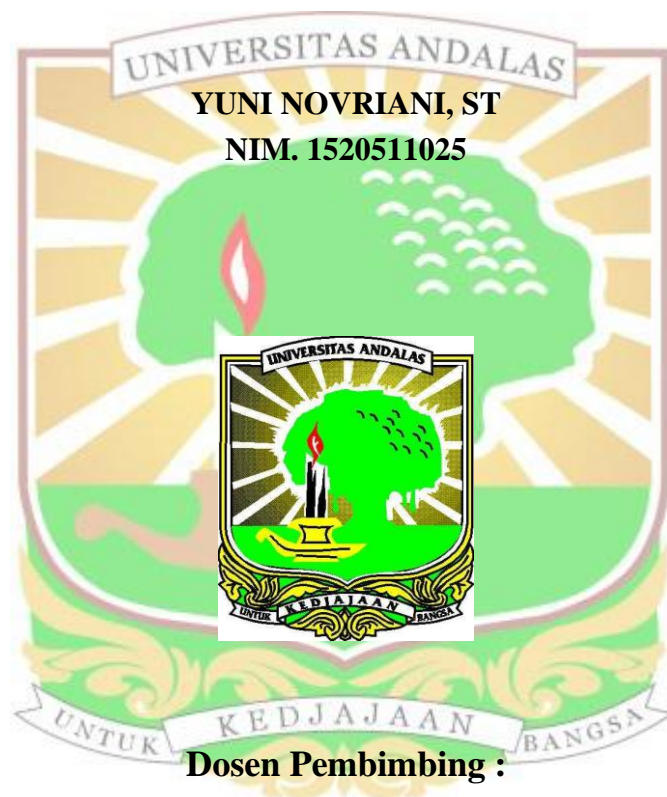


**ANALISIS POLA BAGI HASIL PENDAPATAN  
ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN BURUH**  
Studi Kasus Nelayan Bagan dan Payang Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang  
dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kabupaten Pesisir Selatan

**Tesis**



**Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**

**Indrawari, SE, MA, Ph.D**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018**

**ANALISIS POLA BAGI HASIL PENDAPATAN  
ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN BURUH  
Studi Kasus Nelayan Bagan dan Payang Kelurahan Pasia Nan Tigo  
Kota Padang dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau  
Kabupaten Pesisir Selatan.**

Oleh : Yuni Novriani (1520511025)

Dibawah bimbingan :

Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA dan Indrawari, SE, MA, Ph.D

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis perbandingan pola bagi hasil pendapatan antara pemilik kapal dan nelayan buruh pada alat tangkap bagan dan payang di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang dan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kabupaten Pesisir Selatan, (2) menganalisis implikasi pola bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh terhadap tingkat pendapatan nelayan buruh, serta (3) merumuskan saran kebijakan bagi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan nelayan buruh di masa yang akan datang sehingga bisa diterapkan di daerah pesisir Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner, *indepth interview* dan observasi, serta data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen dari instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan pola bagi hasil pendapatan pada alat tangkap bagan, pemilik kapal memasukkan biaya kerusakan sebagai biaya tanggungan bersama antara pemilik dan nelayan buruh. Sementara pada alat tangkap payang, biaya kerusakan hanya menjadi tanggungan pemilik saja. Pola bagi hasil ini berlaku di kedua lokasi penelitian dan merupakan suatu kebiasaan setempat dan tidak menerapkan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964. Implikasi yang terjadi memperlihatkan pola bagi hasil yang diberlakukan oleh pemilik kapal belum mampu mensejahterakan nelayan buruh, dimana sebagian besar nelayan buruh bagan dan payang di kedua lokasi penelitian hidup dibawah garis kemiskinan. Saran kebijakan yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan buruh yaitu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964, dan perlu diberikan mandat khusus kepada suatu instansi untuk melakukan pengawalan terhadap implementasi undang-undang tersebut agar efektif serta mendesain program yang memberdayakan keluarga nelayan buruh dalam peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan buruh dari sektor non penangkapan seperti usaha *off-fishing*.

**Kata kunci** : pola bagi hasil, bagan dan payang, kemiskinan nelayan buruh